IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL FISHING DI PERAIRAN SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

EDO NUGRAHA, 22150004, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dharma Andalas, 98 Halaman, Tahun 2026

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya perikanan yang melimpah dan berperan penting dalam menunjang perekonomian nasional. Namun, pemanfaatan sumber daya perikanan tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah tindak pidana *illegal fishing*. Praktik *illegal fishing* tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi negara, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem perairan. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang memuat ketentuan sanksi pidana bagi pelaku *illegal fishing*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan serta menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Sumatera Barat telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, penerapan sanksi pidana masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, serta masih adanya pelaku yang melakukan pelanggaran secara berulang. Selain itu, terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim yang menyebabkan efek jera terhadap pelaku belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing* di perairan Sumatera Barat telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan perairan, penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta penjatuhan sanksi pidana yang lebih tegas dan konsisten guna memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di masa yang akan datang.

Kata Kunci: Implementasi, sanksi pidana, *Ilegal Fishing*, perikanan, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Sumatera Barat

Implementation of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Illegal Fishing in West Sumatra Waters Based on Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries

EDO NUGRAHA, 22150004, *Faculty of Law, Social and Human Sciences, Law Study Program, Dharma Andalas University, Ninety Eight Pages, 2026*

ABSTRACT

As an archipelagic nation, Indonesia possesses abundant fishery resources that play a vital role in supporting the national economy. However, the utilization of these resources faces various challenges, notably the crime of illegal fishing. Illegal fishing practices not only cause economic losses to the state but also threaten the sustainability of fish stocks and aquatic ecosystems. To combat this crime, the government enacted Law Number 45 of 2009—amending Law Number 31 of 2004 on Fisheries—which establishes criminal sanctions for perpetrators of illegal fishing. This study aims to examine the implementation of criminal sanctions against illegal fishing perpetrators in West Sumatra waters under Law Number 45 of 2009 and to analyze the effectiveness of these sanctions in addressing fishery-related crimes. The research findings indicate that criminal sanctions against illegal fishing perpetrators in West Sumatra waters have been implemented in accordance with the provisions of Law Number 45 of 2009 through investigation, prosecution, and court proceedings. Nevertheless, the application of these sanctions faces several obstacles, including limited surveillance facilities and infrastructure, the vast expanse of waters requiring monitoring, and the persistence of repeat offenders. Furthermore, inconsistencies in sentencing by judges have hindered the achievement of an optimal deterrent effect.

Based on the research findings, it can be concluded that while the implementation of criminal sanctions against illegal fishing perpetrators in West Sumatra waters aligns with applicable laws and regulations, its effectiveness requires improvement. Therefore, it is necessary to enhance maritime surveillance, strengthen coordination among law enforcement agencies, and impose stricter, more consistent criminal sanctions to create a deterrent effect and prevent future illegal fishing activities.

***Keywords:* Implementation, criminal sanctions, illegal fishing, fisheries, Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries, West Sumatra**